

**RENJA
PERANGKAT DAERAH**



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOEDARSO
TAHUN ANGGARAN 2024**

PONTIANAK, BULAN JANUARI TAHUN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	18
2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	28
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	29
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	29
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
3.3. Program dan Kegiatan	31
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	39
BAB V. PENUTUP	48
 LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan Nasional dan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan secara sinkronisasi antara pembangunan Nasional dan pembangunan daerah. Pelayanan Kesehatan di RSUD Dokter Soedarso sebagai Lembaga Teknis Daerah hendaknya dilakukan dalam sebuah perencanaan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Nasional oleh Kementerian Kesehatan RI dan Rencana Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Penyusunan Renstra dan Renja RSUD Dokter Soedarso merupakan pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. Rencana Strategis merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso disusun untuk mengantisipasi perkembangan, perubahan dan tantangan masa depan yang semakin kompleks. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*ultimate outcome*) yang diharapkan. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)



yang disertai penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, perlu didukung kesiapan sumberdaya yang handal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya keuangan, serta penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4737);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4817);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/390/2014 Tentang Penetapan RS Rujukan Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan



- Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024;
 15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pengelolaan Badan layanan Umum;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1432/2022 tentang Penetapan RSUD dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama Untuk Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura;



20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
25. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 44 RSUD SOEDARSO/ Tahun 2015 tentang Penetapan RSUD Dokter Soedarso sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);



26. Peraturan Gubernur Nomor. 85 Tahun 2022, Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat ;
27. Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan lain sebagainya.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat ini disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen rencana kerja tahun 2024 serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso.

2. Tujuan

- a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;
- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Rumah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat

Daerah

Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 melaksanakan 1 urusan, 3 program, 14 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah



-
- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor
 - h. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembangunan Rumah sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - Pengembangan Rumah Sakit



-
- Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai Habis pakai lainnya (Sprei, Handuk dan habis pakai lainnya)
 - Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Pengelolaan Penelitian Kesehatan
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Peningkatan Tata Kelola Rumah sakit
 - Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan
3. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN MANUSIA



- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah provinsi
 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 605.306.053.598,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp 570.598.022.701,-

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Rumah Sakit Umum Darah Dokter Soedarso Pontianak sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel:



TABEL I

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak S/D Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : RSUD Dr. Soedarso Pontianak

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja (outcome) Program/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Akhir Periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2023)	Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD s/d Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan									
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi									
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			995 org/bln	995 org/bln	100%	995 org/bln	995 org/bln	100%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan tanggapan Pemeriksa	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan			4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	4 Laporan	100%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			10 Orang	10 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	20 Orang	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan			100 Paket	100 Paket	100%	100 Paket	100 Paket	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			106 Unit	106 Unit	100%	106 Unit	106 Unit	100%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Peningkatan Pelayanan BLUD									
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	100%
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANG DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT									
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya									
	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Diingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000			2 Unit	2 Unit	95%	1 Unit	1 Unit	100%
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan			46 Unit	44 Unit	98%	46 Unit	46 Unit	100%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)	Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan			35 Paket	35 Paket	100%	35 Paket	35 Paket	100%
	Pemeliharaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar					100%			100%
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi									
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar								
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan			14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi								
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi									
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar			1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%



1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan			1 Unit	1 Unit	80%	1 Unit	1 Unit	100%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN									
	<i>Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</i>									
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)			141 Orang	141 Orang	100%	141 Orang	141 Orang	100%
	<i>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</i>									
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat			295 Orang	295 Orang	100%	295 Orang	295 Orang	100%



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel II
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah RSUD Dr. Soedarso Pontianak
Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi	Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2023	
1	BOR	60-80 %		60-80 %							
2	LOS	6-9 hari		6-9 hari							
3	TOI	1-3 hari		1-3 hari							
4	BTO	40 - 50		40 - 50							
5	NDR	<50/1000		<50/1000							
6	GDR	<75/1000		<75/1000							
7	Status Akreditasi Rumah sakit	Paripurna		Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	
8	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	



2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat. RSUD dr. Soedarso dihadapkan pada berbagai permasalahan.

Berdasarkan analisis gambaran umum pelayanan RSUD dr. Soedarso selama lima tahun terakhir, terdapat berbagai indikator yang telah memenuhi target, namun disisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani secara terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam waktu jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi RSUD dr. Soedarso diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan renstra sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi RSUD dr. Soedarso di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah :

- 1) Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari internal.
 - a) Jumlah tenaga kesehatan belum memadai.



Tenaga medis guna memenuhi kebutuhan spesialisik dan subspecialistik belum memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas. Khususnya terkait dengan pemenuhan standar akreditasi dan standar pelayanan di RSUD dr. Soedarso begitu juga tenaga keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya. Adanya pengembangan layanan tidak diikuti dengan penambahan SDM.

- b) SIMRS belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal.

SIMRS belum sepenuhnya menjawab kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih dalam memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal serta tuntutan masyarakat akan ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

- c) Pemeliharaan sarana, prasarana dan alat kesehatan masih rendah.

Sarana, prasarana dan alat kesehatan sudah memenuhi standar pelayanan dan akreditasi. Pemanfaatan sarana, prasarana dan alat kesehatan juga dilakukan pemeliharaan sehingga sarana, prasarana dan alat kesehatan dapat berfungsi dengan baik dan optimal.

- d) Mutu pelayanan yang kurang memadai.

Kondisi masih belum memadainya mutu pelayanan di RSUD Dokter Soedarso dapat dilihat pada indikator mutu klinik, manajemen dan mutu keselamatan pasien. Waktu tunggu rawat jalan, penundaan



operasi elektif, pasien pulang paksa dan *Net Death Rate* (NDR) yang masih tidak sesuai dengan SPM

e) Belum adanya kebijakan *Reward* dan *Punishment*

Adanya kebijakan program *reward* dan *punishment* yang komprehensif dalam rangka meningkatkan motivasi kerja pegawai.

2) Analisis isu-isu strategis yang bersumber dari eksternal.

a) Keterbatasan dana Pemerintah Pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD) dalam mensubsidi rumah sakit

b) Penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat yang dikelola oleh BPJS

c) Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit

d) Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat.

Keberadaan dalam persaingan industri kesehatan di Kota Pontianak dan sekitarnya, termasuk semakin banyaknya dokter dan masyarakat membuka praktek/mendirikan klinik atau fasilitas kesehatan lainnya sehingga menyebabkan tingkat persaingan dalam industri kesehatan di Kota Pontianak semakin ketat.



2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal RKPD Tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja SKPD Tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan RSUD Dr. Soedarso Pontianak. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada table III



Tabel III
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	A	Nilai	751.611.391.607	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Perangkat Daerah	A	Nilai	463.040.189.186	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	Nilai	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu	100	%	155.300.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu	100	%	78.450.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	40.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	16.900.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	11.280.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	22.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen PeruDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	22.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen PeruDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	8.850.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	20.800.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	13.825.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	25.500.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	12.195.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase pengelolaan Keuangan	100	%	158.742.370.807	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pengelolaan Keuangan	100	%	148.510.238.603	
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050	Orang/perbulan	158.216.140.807	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1050	Orang/perbulan	148.003.418.603	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	485.730.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	470.520.000	
	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	13.500.000	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	12.100.000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	27.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	24.200.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	13.500.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	12.360.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	2 Dokumen	13.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.360.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Persentase Validasi Data Kepegawaian RS sesuai Standar	100 %	394.088.700.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah		Persentase Validasi Data Kepegawaian RS sesuai Standar	100 %	131.300.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Perlengkapannya		Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut dan perlengkapannya	1050 Paket	393.750.000.000						
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	63.700.000	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	28.300.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	125.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	103.000.000	
	Sosialisasi dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	30 Orang	150.000.000						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi	100 %	212.500.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelaksanaan Administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi	100 %	280.944.000	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	212.500.000	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	280.944.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	2.950.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	2.184.222.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	4 Paket	1.700.000.000	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang disediakan	4 Paket	978.160.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	1.050.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	105 Unit	1.007.630.000	



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	200.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	198.432.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang		15.437.020.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang		11.842.674.583	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.800.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	11.842.674.583	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	8.637.020.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	-	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100 %	12.000.000						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	12.000.000						
	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD	100 %	180.000.000.000	Peningkatan Pelayanan BLUD		Persentase Pelayanan BLUD	100 %	300.000.000.000	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	180.000.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	300.000.000.000	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Nilai Indikator Nasional Mutu (INM)	70 %	152.798.230.000	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT		Persentase Nilai Indikator Nasional Mutu (INM)	70 %	54.361.013.917	
			Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perbekalan Alat Kesehatan dan Teknologi Kesehatan	70 %				Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perbekalan Alat Kesehatan dan Teknologi Kesehatan	70 %		
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pelayanan Penunjang Medik sesuai Standar Pelayanan Minimal	85 %	149.740.000.000	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pelayanan Penunjang Medik sesuai Standar Pelayanan Minimal	85 %	53.165.851.717	
			Persentase Pelayanan Penunjang Non Medik sesuai Standar Pelayanan Minimal	85 %				Persentase Pelayanan Penunjang Non Medik sesuai Standar Pelayanan Minimal	85 %		



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	2 Unit	65.000.000.000	Pengembangan Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit	25.845.874.980		
	Rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Sakit		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	2 Unit	400.000.000							
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	55 Unit	80.000.000.000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	55 Unit	26.994.976.737		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan	15 Paket	200.000.000	Pengadaan Bahan Habis Pakai lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)		Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya) yang Disediakan				
	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit		Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	5 Unit	500.000.000							
	Pemeliharaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	3 Unit	1.000.000.000							
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	140.000.000							
	Pengadaan Obat, Vaksin, makanan dan Minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya		Jumlah Obat, Vaksin, makanan dan Minuman serta fasilitas Kesehatan lainnya yang disediakan	5 Paket	2.500.000.000							
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	325.000.000		



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase Pelayanan Medik sesuai Indikator Nasional Mutu (INM)	85	%	2.129.110.000	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Pelayanan Medik sesuai Indikator Nasional Mutu (INM)	85	%	424.250.000	
			Persentase Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai Indikator Nasional mutu (INM)	85	%			Persentase Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan sesuai Indikator Nasional mutu (INM)	85	%		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana		Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100	Orang	780.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100	Orang	100.000.000	
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)		Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan Kesehatan pada kondisi kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	Orang	780.000.000	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan Kesehatan pada kondisi kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	Orang	175.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	18.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	17.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	143.110.000,00	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	74.250.000,00	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	58.000.000,00	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	58.000.000,00	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1	Dokumen	200.000.000,00						
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan		Jumlah Dokumen Pengelolaan Penelitian Kesehatan	16	Dokumen	150.000.000						
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		Persentase Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi	70	%	112.695.000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi	70	%	36.694.800	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	4	Dokumen	36.695.000						
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	36.694.800	
	Pengadaan Alat/ Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang Tersedia	25	Unit	56.000.000						



NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penilaian Tata Kelola RS	85 %	816.425.000	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase penilaian Tata Kelola RS	85 %	734.217.400	
			Persentase Mutu Pelayanan nasional	85 %				Persentase Mutu Pelayanan nasional	85 %		
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	516.425.000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit		Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	501.185.000	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	300.000.000	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	233.032.400	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang tersertifikasi	100 %	8.000.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang tersertifikasi	100 %	6.386.366.100	
	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Terpenuhi SDM sesuai standar pelayanan Rumah sakit	85 %	6.000.000.000	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi		Persentase Terpenuhi SDM sesuai standar pelayanan Rumah sakit	85 %	4.158.991.500	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	160 Orang	6.000.000.000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	160 Orang	4.158.991.500	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi	85 %	2.000.000.000	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi		Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi	85 %	2.227.374.600	
	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	2.000.000.000	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	2.115.374.600	
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		Jumlah Hasil Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia	120 Orang	112.000.000	
				Total	912.409.621.607			Total		523.787.569.203	



2.5 Penelaahan Usulan Program dan Masyarakat

Rencana kerja didiskusikan pada saat Asistensi Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soedarso Pontianak.

Pada forum Renja Internal RSUD Dr. Soedarso Pontianak disampaikan usulan program dan kegiatan dari semua bidang yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso Pontianak bersifat harapan terhadap pelaksanaan Program, Kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan.

Pada Forum Sosialisasi Pelayanan Publik yang melibatkan masyarakat setempat dan Dewan Pengawas disampaikan saran dan masukan dari masyarakat tentang harapan terhadap perubahan dan perbaikan rumah sakit dari segi pelayanan dan fasilitas yang lebih baik untuk kedepannya.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang menjadi visi Kemenkes adalah **Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan** yang akan dicapai melalui 5 misi pembangunan, yaitu :

- 1) Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak dan Remaja
- 2) Perbaikan Gizi Masyarakat
- 3) Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 4) Pembudayaan GERMAS
- 5) Memperkuat Sistem Kesehatan

Terdapat 6 tujuan Kementerian Kesehatan pada Tahun 2020-2024 yaitu :

- 1) Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat
- 2) Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
- 3) Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh



- 4) Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
- 5) Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
- 6) Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Arah kebijakan kesehatan nasional bidang kesehatan yaitu : “Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, dengan penekanan pada penguatan sistem pelayanan kesehatan dasar dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”.

Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat

RSUD dr. Soedarso terletak di Jalan Dr. Soedarso Nomor 1, dimana dalam pembangunan sarana dan prasarana serta pengembangannya tidak bertentangan dengan Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 -2034.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan selama 1 (satu) tahun meliputi Sasaran, Program, Kegiatan , Sub Kegiatan Indikator Kinerja dan target yang akan direalisasikan. Adapun sasaran dan indikator sasaran



beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
Menciptakan SDM yang berdaya saing, berfokus pada peningkatan derajat kesehatan (UHH)	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja RSUD Dr. Soedarso Pontianak tahun 2024 mencakup 3 Program 14 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan



-
- Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pegawai
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Peningkatan Pelayanan BLUD
 - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT



-
- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Pengembangan Rumah Sakit
 - Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau berpotensi Bencana
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
- d. Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
- Peningkatan Tata Kelola Rumah sakit
 - Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan



3 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN MANUSIA

- a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah provinsi
 - Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD tahun 2024 dan Prakiraan maju tahun 2025 RSUD Dr. Soedarso Pontianak untuk sumber dana APBD dan BLUD dan DAK secara detail dapat dilihat pada lampiran Tabel IV



Tabel IV

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. SOEDARSO PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025			
			TARGET 2024		PAGU	LOKASI		SUMBER DANA	TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	86,42	Indeks	315.048.233.763	RSUD Dr. Soedarso Prov Kalbar		86,98	Indeks	348.022.233.763	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Predikat				BB	Predikat		
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu	100	%	78.450.000			100	%	78.450.000	
1.02.01.1.01.0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	16.900.000			2	Dokumen	16.900.000
1.02.01.1.01.0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	11.280.000			1	Dokumen	11.280.000
1.02.01.1.01.0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	15.400.000			1	Dokumen	15.400.000
1.02.01.1.01.0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	Dokumen	8.850.000			1	Dokumen	8.850.000
1.02.01.1.01.0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	13.825.000			2	Laporan	13.825.000
1.02.01.1.01.0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	Laporan	12.195.000			4	Laporan	12.195.000
1.02.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pengelolaan Keuangan	100	%	480.720.000			100	%	480.720.000
1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			-				-	
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	470.520.000			1	Dokumen	470.520.000
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2	Dokumen	3.400.000			2	Dokumen	3.400.000
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4	Laporan	6.800.000			4	Laporan	6.800.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET 2024	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100	%		12.360.000		100	%	12.360.000
1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2	Dokumen		12.360.000		2	Dokumen	12.360.000
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Validasi Data Kepegawaian RS sesuai Standar	100	%		131.300.000		100	%	131.300.000
1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3	Dokumen		28.300.000		3	Dokumen	28.300.000
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	Orang		103.000.000		30	Orang	103.000.000
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi	100	%		280.944.000		100	%	280.944.000
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25	Laporan		280.944.000		30	Laporan	280.944.000
1.02.01.1.07	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100	%		2.184.222.000		100	%	2.184.222.000
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	2	Paket		978.160.000		5	Paket	978.160.000
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109	Unit		1.007.630.000		110	Unit	1.007.630.000
1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit		198.432.000		2	Unit	198.432.000
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100	%		11.880.237.763		100	%	14.854.237.763
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	Laporan		10.445.237.763		12	Laporan	10.450.237.763
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	4	Laporan		1.435.000.000		12	Laporan	4.404.000.000
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100	%		300.000.000.000		100	%	330.000.000.000
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Unit Kerja		300.000.000.000		1	Unit Kerja	330.000.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75	%		54.349.550.737		78	%	58.112.675.737
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	85	%		53.154.388.537		87	%	56.915.513.537



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		
			TARGET 2024	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1.02.02.1.01.0010		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	314	Unit	26.983.513.537		222	Unit	25.915.513.537
1.02.02.1.01.0025		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	Dokumen	325.000.000		0	Paket	-
1.02.02.1.01.0026		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Diingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3	Unit	25.845.875.000		1	Unit	31.000.000.000
1.02.02.1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	85	%	424.250.000		87	%	426.250.000
1.02.02.1.02.0001		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100	Orang	100.000.000		100	Orang	100.000.000
1.02.02.1.02.0002		Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jmlah Penduduk yang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan pada kondisi kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	Orang	175.000.000		1000	Orang	175.000.000
1.02.02.1.02.0004		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	17.000.000		1	Dokumen	19.000.000
1.02.02.1.02.0009		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4	Dokumen	74.250.000,00		4	Dokumen	74.250.000
1.02.02.1.02.0016		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	58.000.000,00		1	Dokumen	58.000.000
1.02.02.1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi	70	%	36.694.800		75	%	36.694.800
1.02.02.1.03.0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan sistem informasi Kesehatan	3	Dokumen	36.694.800		3	Dokumen	36.694.800
1.02.02.1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	100	%	734.217.400		100	%	734.217.400
1.02.02.1.04.0002		Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1	Unit	501.185.000		1	Unit	501.185.000
1.02.02.1.04.0003		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1	Unit	233.032.400		1	Unit	233.032.400



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
			TARGET 2024	PAGU	LOKASI	SUMBER DANA		TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia keehatan yang tersertifikasi	70 %	6.386.366.100				80 %	6.274.366.100
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terpenuhinya SDM sesuai standar pelayanan Rumah sakit	85 %	4.158.991.500				87 %	4.158.991.500
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	48 Orang	4.158.991.500				48 Orang	4.158.991.500
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi	85 %	2.227.374.600				87 %	2.115.374.600
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	2.115.374.600				300 Orang	2.115.374.600
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Hasil Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	112.000.000				2 Dokumen	112.000.000
			Total	375.784.150.600					412.409.275.600



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Prioritas

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT dengan anggaran yang diusulkan Rp. 54.349.550.737,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi*

- Pengembangan Rumah Sakit, Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 25.845.875.000,- target output Jumlah Pembangunan Gedung, Indikator Keluaran Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit yang berdasarkan kelas Rumah Sakit yang memenuhi Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 3 Unit, hasil kegiatan Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit
- Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 26.983.513.537,- target output Jumlah Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Indikator Keluaran Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan 314 Unit , hasil kegiatan



Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit

- Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 325.000.000,- target output Jumlah Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai lainnya) , Indikator Keluaran Jumlah Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke fasilitas Kesehatan yang Disediakan 1 Dokumen, hasil kegiatan Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standar pelayanan Rumah Sakit

b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 100.000.000,- target output Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana, Indikator Keluaran Jumlah jumlah penduduk yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan / atau berpotensi bencana provinsi sesuai standar 100 orang, hasil kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit



-
- Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 175.000.000,- target output pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Indikator Keluaran Jumlah jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Kesehatan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar 100 orang, hasil kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 17.000.000,- target output Peserta Pemeriksaan Kesehatan Gratis (Bhakti Sosial), Indikator Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif 1 Dokumen, hasil kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit
 - Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 74.250.000,- target output Peralatan Promosi Kesehatan, Indikator Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 4 Dokumen, hasil kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 58.000.000,- target output Pengelolaan Jaminan



Kesehatan Masyarakat, Indikator Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen, hasil kegiatan Persentase Ketersediaan Layanan Kesehatan sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit.

c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

- Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 36.694.800,- target output Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan, Indikator Keluaran Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan sistem Informasi Kesehatan 3 Dokumen, hasil kegiatan Persentase Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi.

d. Penerbitan Izin Rumah sakit Kelas B dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi

- Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 501.185.000,- target output Informasi / Publikasi Rumah Sakit dan Laporan Survey Kepuasan masyarakat, Indikator Keluaran Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar 1 Unit, hasil kegiatan Persentase Penilaian Tata Kelola dan Mutu Pelayanan Nasional.
- Peningkatan Mutu Pelayanan fasilitas Kesehatan Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 233.032.400,- target output Laporan Peningkatan Mutu dan Keselamatan pasien, Indikator Keluaran jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)



Pelayanan Kesehatan 1 unit, hasil kegiatan Persentase Penilaian
Tata Kelola RS dan Mutu Pelayanan Nasional

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN MANUSIA dengan anggaran yang diusulkan Rp. 6.386.366.100,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut
 - a. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 4.158.991.500,- target output Tenaga residen, Spesialistik/Sub Spesialistik, indikator keluaran Jumlah sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standard di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) 48 orang , hasil kegiatan Persentase SDM sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit.
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Tekhnis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Provinsi
 - Peningkatan Kompetensi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 2.115.374.600,- target output Pelatihan Sumber daya Manusia Kesehatan / In House Training, Indikator Keluaran Jumlah sumber daya manusia kesehatan kompetensi dan kualifikasi meningkat 300 Orang , hasil kegiatan Persentase SDM sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit.



- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sub Kegiatan ini sebesar Rp. 112.000.000,- target output Jumlah Hasil Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 1 Dokumen , hasil kegiatan Persentase SDMK sesuai Standar Pelayanan Rumah Sakit.



RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) TA. 2024

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	RANCANGAN AWAL RENJA (Rp)	RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2024							
					TOTAL	GAJI	DAK FISIK	DAU BIDANG KESEHATAN	DAU	DBH CHT	BLUD	REGULER
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Masyarakat	86.4 Indeks	315.048.233.763	315.048.233.763	-	-	-	-	-	300.000.000.000	15.048.233.763
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB Predikat									
1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai prosedur dan tepat waktu	100 %	78.450.000	78.450.000	-	-	-	-	-	-	78.450.000
1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16.900.000	16.900.000							16.900.000
1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	11.280.000	11.280.000							11.280.000
1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.400.000	15.400.000							15.400.000
1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.850.000	8.850.000							8.850.000
1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	13.825.000	13.825.000							13.825.000
1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	12.195.000	12.195.000							12.195.000
1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase pengelolaan Keuangan	100 %	480.720.000	480.720.000	-	-	-	-	-	-	480.720.000
1.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuesahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	470.520.000	470.520.000							470.520.000
1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen	3.400.000	3.400.000							3.400.000
1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	4 Laporan	6.800.000	6.800.000							6.800.000
1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	12.360.000	12.360.000	-	-	-	-	-	-	12.360.000
1.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	12.360.000	12.360.000							12.360.000
1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Validasi Data Kepegawaian RS sesuai Standar	100 %	131.300.000	131.300.000	-	-	-	-	-	-	131.300.000
1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	28.300.000	28.300.000							28.300.000
1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	103.000.000	103.000.000							103.000.000



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	RANCANGAN AWAL RENJA (Rp)	RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2024								
					TOTAL	GAJI	DAK FISIK	DAU BIDANG KESEHATAN	DAU	DBH CHT	BLUD	REGULER	
1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi umum yang mendukung kelancaran tugas dan Fungsi	100 %	280.944.000	280.944.000	-	-	-	-	-	-	-	280.944.000
1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	280.944.000	280.944.000								280.944.000
1.02.01.1.07	Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	100 %	2.184.222.000	2.184.222.000	-	-	-	-	-	-	-	2.184.222.000
1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan	2 Paket	978.160.000	978.160.000								978.160.000
1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	109 Unit	1.007.630.000	1.007.630.000								1.007.630.000
1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	198.432.000	198.432.000								198.432.000
1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	100 %	11.880.237.763	11.880.237.763	-	-	-	-	-	-	-	11.880.237.763
1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan	10.445.237.763	10.445.237.763								10.445.237.763
1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	4 Laporan	1.435.000.000	1.435.000.000								1.435.000.000
1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD	100 %	300.000.000.000	300.000.000.000	-	-	-	-	-	-	300.000.000.000	-
1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	300.000.000.000	300.000.000.000							300.000.000.000	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	75 %	54.349.550.737	54.349.550.737	-	9.951.792.092	19.600.043.000	24.705.001.245	92.714.400	-	-	-
1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	85 %	53.154.388.537	53.154.388.537	-	9.951.792.092	19.600.043.000	23.509.839.045	92.714.400	-	-	-
1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	314 Unit	26.983.513.537	26.983.513.537		9.951.792.092	16.156.268.000	782.739.045	92.714.400			
1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1 Dokumen	325.000.000	325.000.000				325.000.000				
1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	3 Unit	25.845.875.000	25.845.875.000			3.443.775.000	22.402.100.000				



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/ PROGRAM /KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2024	RANCANGAN AWAL RENJA (Rp)	RANCANGAN PAGU INDIKATIF 2024								
					TOTAL	GAJI	DAK FISIK	DAU BIDANG KESEHATAN	DAU	DBH CHT	BLUD	REGULER	
1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat daerah Provinsi	85 %	424.250.000	424.250.000	-	-	-	424.250.000	-	-	-	
1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	100 Orang	100.000.000	100.000.000				100.000.000				
1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian Luar Biasa (KLB)	Jmlah Penduduk yang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan pada kondisi kejadian Luar Biasa Provinsi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100 Orang	175.000.000	175.000.000				175.000.000				
1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	17.000.000	17.000.000				17.000.000				
1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	74.250.000,00	74.250.000				74.250.000,00				
1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	58.000.000,00	58.000.000				58.000.000,00				
1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Rumah Sakit yang Terintegrasi	70 %	36.694.800	36.694.800	-	-	-	36.694.800	-	-	-	
1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan sistem informasi Kesehatan	3 Dokumen	36.694.800	36.694.800				36.694.800				
1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terakreditasi	100 %	734.217.400	734.217.400	-	-	-	734.217.400	-	-	-	
1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	1 Unit	501.185.000	501.185.000				501.185.000				
1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	1 Unit	233.032.400	233.032.400				233.032.400				
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Sumber Daya Manusia kesehatan yang tersertifikasi	70 %	6.386.366.100	6.386.366.100	-	-	-	6.386.366.100	-	-	-	
1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi	Persentase Terpenuhinya SDM sesuai standar pelayanan Rumah sakit	85 %	4.158.991.500	4.158.991.500	-	-	-	4.158.991.500	-	-	-	
1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	48 Orang	4.158.991.500	4.158.991.500				4.158.991.500				
1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Persentase SDM yang Meningkatkan Kompetensi	85 %	2.227.374.600	2.227.374.600	-	-	-	2.227.374.600	-	-	-	
1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	300 Orang	2.115.374.600	2.115.374.600				2.115.374.600				
1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Hasil Dokumen Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	112.000.000	112.000.000				112.000.000				
TOTAL ANGGARAN					375.784.150.600	375.784.150.600	-	9.951.792.092	19.600.043.000	31.091.367.345	92.714.400	300.000.000.000	15.048.233.763



BAB V PENUTUP

Rencana kerja RSUD Dokter Soedarso Tahun Anggaran 2024 dengan Total Anggaran Rp. 375.784.150.600,- ini memuat Anggaran APBD, BLUD dan DAK yang terdiri dari 3 Program dengan 14 kegiatan dan 34 Sub Kegiatan, alokasi anggaran APBD sebesar Rp. 65.832.358.508,- yang terdiri dari; anggaran DAU Bidang Kesehatan Rp. 19.600.043.000,-, anggaran DAU Rp. 31.091.367.345,-, anggaran DBH CHT Rp. 92.714.400,- dan anggaran regular Rp. 15.048.233.763, anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Alokasi Anggaran sebesar Rp. 300.000.000.000,-, sedangkan untuk anggaran APBN / DAK terdiri dari 1 Program dan 1 Kegiatan dengan alokasi anggaran sementara sebesar Rp. 9.951.792.092,- Rencana ini akan dijadikan sebagai pedoman / acuan bagi Rumah Sakit umum Daerah Dokter Soedarso Prov Kalbar dalam menjalankan tugas dan fungsi SKPD serta sebagai acuan Keberhasilan pelaksanaan Renja dalam menyusun program / kegiatan SKPD tahun 2024 .

Pontianak, Januari 2024
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dokter Soedarso



Drg. HARY AGUNG TJAHYADI, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19690520-199803 1 008